



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5157-5165

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

Nurlaelasari Abdullah<sup>1✉</sup>, Lisda Van Gobel<sup>2</sup>, Yahya Antu<sup>3</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: [nurlaelashary7@gmail.com](mailto:nurlaelashary7@gmail.com)<sup>1✉</sup>,

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang di ajukan kepada sejumlah informan dengan fokus penelitian yaitu, SOP, Waktu Penyelesaian, dan Responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dari aspek standar Operasional prosedur, waktu penyelesaian dan responsivitas aparat masih kurang optimal sehingga masyarakat yang datang didalam pengurusannya merasa dirugikan atas waktu dan keamanan. Disarankan perlunya pemerintah desa Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo meningkatkan pelayanannya pada masyarakat khususnya dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari aspek standar Operasional prosedur, waktu penyelesaian dan responsivitas sehingga pemerintah desa dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

Kata Kunci: *Pelayanan Penerbitan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah*

## Abstract

The aim of this research is to determine the Service for Issuing a Statement of Relinquishment of Land Rights (SPPHT) in Motilango Village, Tibawa District, Gorontalo Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through observation and interviews using interview guidelines submitted to a number of informants with the research focus, namely, SOP, Completion Time, and Responsiveness. The results of the research show that the Service for Issuing Statement of Relinquishment of Land Rights (SPPHT) in Motilango Village, Tibawa District, Gorontalo Regency from the aspects of standard operational procedures, completion time and responsiveness of the authorities is still less than optimal so that the people who come to handle it feel disadvantaged in terms of time and security. It is recommended that the Motilango village government, Tibawa subdistrict, Gorontalo district, improve its services to the community, especially in the Land Rights Release Statement Issuance Service (SPPHT) from the aspects of standard operational procedures, completion time and responsiveness so that the village government can provide maximum service to the community.

Keywords: *Publishing Services, Statement of Release of Rights Land*

## PENDAHULUAN

Desa Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo sebagai salah satu unsur pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo seperti yang berkaitan dengan hal perijinan dan penerbitan, surat pengantar e-KTP, surat pengantar Akta Kelahiran, Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan sebagainya memang diharuskan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, karena dewasa ini masyarakat kian kritis dengan kondisi birokrasi yang ada pada pemerintahan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor desa Motilango bahwa masyarakat yang mengurus kepemilikan hak atas tanah pada tahun 2020 sebesar 54 surat dengan presentase 31,66%, pada tahun 2021 sebanyak 34 surat dengan presentase 19,44%, Tahun 2022 sebesar 96 surat dengan persentase 23,05% dan pada tahun 2023 sebesar 44 surat dengan presentase 25,84%. Hal tersebut menggambarkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengurus kepemilikan hak atas tanah. Seperti yang kita ketahui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Program Nasional Agraria (PRONA) yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikenal sekarang adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis untuk kelompok masyarakat ekonomi lemah, yang menjadi syarat agar

bisa mendapatkan sertifikat gratis tersebut salah satunya dengan mempunyai surat pelepasan hak atas tanah yang harus dimiliki terlebih dahulu.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPPTH) di desa Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo. Dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan pelepasan hak atas tanah (SPPTH) belum adanya kejelasan standar operasional prosedur (SOP) dari pemerintah desa ke masyarakat sehingga masyarakat harus pulang karena syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak ada papan informasi pelayanan yang menjelaskan tentang prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan sehingga sebagian masyarakat merasa kebingungan.

Permasalahan berikutnya adalah dalam memberikan pelayanan masih kurang optimal, hal ini terindikasi dari waktu penyelesaian SPPTH bisa berhari-hari yang disebabkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala desa serta aparatur desa yang tidak berada ditempat atau sedang dinas luar dan berkasnya belum lengkap secara otomatis waktu yang diperlukan untuk memproses surat yang dimaksud akan lebih lama dari perkiraan.

Selanjutnya adalah kurangnya responsivitas aparatur desa dalam melayani masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang melakukan pengurusan pelepasan hak atas tanah di Kantor desa motilango menyatakan aparatur desa belum cukup tanggap atau responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menunda-nunda pekerjaan dan dalam menyampaikan informasi aparatur desa motilango masih kurang jelas dan berbelit-belit sehingga sebagian masyarakat merasa kebingungan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Verifikasi Data, Kesimpulan Data.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah langkah-langkah yang dibahas dalam penelitian mengenai Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPTH) di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Hasil dan analisis kualitatif terhadap masing-

masing fokus penelitian dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

Untuk Standard Operating Procedure (SOP) dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) belum ada dikarenakan pelayanan di kantor desa motilango bersifat umum termasuk pengurusan SPPHT serta dijalankan sesuai regulasi mengenai Surat Tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan SPPHT di desa Motilango menggunakan regulasi berdasarkan pengurusan tanah dari BPN. selain itu dalam pelayanan pengurusan SPPHT di desa Motilango, masyarakat tidak mengetahui terkait prosedur pengurusannya, hanya informasi yang disampaikan secara lisan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Pengurusan SPPHT di desa Motilango kurang jelas, bahkan ada pegawai yang tidak tahu menahu terkait syarat-syarat pengurusan SPPHT. Sehingga masyarakat harus bolak balik mempersiapkan berkas dalam pengurusan SPPHT. Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi belum maksimal dilakukan dimana masyarakat desa motilango belum melihat adanya sosialisasi dalam pengurusan SPPHT. Sosialisasi dilakukan hanya 1 kali bersama BPN namun tidak dihadiri semua masyarakat sehingga sosialisasi tidak maksimal dan tersampaikan kepada masyarakat desa.

Selain itu di kantor desa Motilango belum ada papan informasi yang tersedia dikarenakan penggunaannya yang dianggap kurang efektif dan informasi-informasi terkait terutama SPPHT dan informasi lainnya sudah melalui sosialisasi dan juga media sosial semisal grup Whatsapp. Untuk papan informasi tidak digunakan dikarenakan kurang efektif serta masyarakat kurang memperhatikan apa-apa informasi yang ada di papan informasi. Dimana papan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk hal-hal apa saja yang diperlukan dan disiapkan terutama dokumen untuk pengurusan SPPHT. Hal ini sejalan dengan pendapat Insani dalam (Rismayanti, Musadieg and Aini, 2018) menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan. SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013: 86).

Dalam penyelesaian pengurusan SPPHT di desa Motilango, jangka waktu pengurusan Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) sifatnya kondisional, sesuai dengan surat yang akan diterbitkan nanti yang memiliki tahapan-tahapan yaitu

pengukurannya, dan kelengkapan berkas. Apabila berkas yang di bawa sudah lengkap dari ukuran tanah, gambar dan syarat-syarat yang lainnya, maka surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) dapat diselesaikan dalam 1 hari bahkan kurang dari itu. Jangka waktu pengurusan SPPHT juga bisa sampai berhari-hari apabila dalam proses penandatanganan surat kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam surat seperti ahli waris yang ada di luar desa dan juga masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan tanah masyarakat yang melakukan pengurusan SPPHT. Yang lama adalah ketika berkasnya belum lengkap dan juga ketika membutuhkan tanda tangan kepala desa yang harus menyesuaikan dengan keberadaan kepala desa tidak berada ditempat sehingga lama untuk diproses oleh aparat desa.

Waktu Pelayanan surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) sudah sangat efektif. Bahkan bisa dikatakan cepat jika dibandingkan dengan pelayanan di desa lainnya di kecamatan Tibawa. Hanya saja kendalanya adalah dalam pengurusan berkas yang dilakukan oleh masyarakat. Jangka waktu pembuatan SPPHT sangat cepat yang kurang efektif itu pada pihak penjual bagi masyarakat. Untuk jangka waktu pembuatan surat SPPHT bagi masyarakat sangat cepat dan efektif jika berkas sudah lengkap dan status tanahnya juga tidak memiliki masalah. Yang bermasalah adalah ketika berkas tidak lengkap atau tanahnya masih bermasalah maka kepastian waktu penyelesaian juga tidak pasti. Pemerintah desa kurang membantu masyarakat jika terjadi permasalahan dalam kelengkapan administrasi oleh masyarakat.

Hal ini sesuai pendapat Saleh (2018:106) yang menyatakan bahwa secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan tentang waktu penyelesaian. Respon Kepala Desa mewakili pemerintah terhadap masyarakat sudah baik jika berkasnya sudah lengkap dan prosesnya sudah benar. Serta pihak-pihak terkait dalam surat sudah menandatangani maka hari ini juga suratnya selesai. Selain itu pemerintah desa Motilango sangat tanggap terhadap semua masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan baik itu surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) maupun pelayanan surat lainnya, tetapi sebagai aparat juga memiliki pekerjaan atau tugas lain yang sesuai tupoksi, juga mengenai Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) tergantung dari kelengkapan berkas serta status tanah yang tidak memiliki masalah contohnya seperti tanah budel, dan lainnya.

Disisi lain respon aparat desa dalam memberikan pelayanan masih kurang baik. Walaupun kondisi pekerjaan yang banyak akan tetapi untuk memberikan pelayanan

seharusnya mendahulukan melayani masyarakat bukan masyarakat menunggu aparat desa terkadang menunda-nunda. Masyarakat akan direspon di datangi berulang-ulang dan di hubungi lewat telpon. Tindakan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa jika terdapat masalah atau kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam hal pengurusan surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) yaitu memberikan arahan kepada Aparat desa untuk segera mencari solusi agar masalah masyarakat segera selesai sesuai regulasi yang ada. Pemerintah desa Motilango jika terdapat masalah atau kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam hal pengurusan surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah (SPPHT) yaitu memberikan solusi dengan memberikan penjelasan mengenai proses dan alur pembuatan surat melalui perangkat desa yang ada. Tindakan Aparat Desa masih kurang tanggap dalam melayani masyarakat yang mengalami kesulitan terutama masyarakat yang kurang begitu mengerti mengenai alur pembuatan surat sehingga harus bertanya dulu kepada kepala dusun. Sikap Aparat Desa yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat sudah sangat tanggap dan memberikan pelayanan secara cepat dan efisien. Aparat desa didalam memberikan pelayanan adalah selalu yang efektif dan efisien sesuai regulasi yang ada serta dalam melayani selalu berusaha didalam pelayanan untuk selau ramah kepada masyarakat. Hanya saja terkadang sikap aparat desa dalam memberikan pelayanan masih kurang terutama didalam menerapkan skala prioritas dalam mengerjakan tugasnya. misalnya aparat desa yang mendahulukan pekerjaan yang masih lama jangka waktu penyelesaiannya dibandingkan mendahulukan melayani masyarakat yang datang ke kantor kepala desa utama untuk meminta pelayanan administrasi.

Hal ini sesuai pendapat (Sinamblea, 2016) dalam prinsip-prinsip pelayanan publik dimana responsivitas adalah kemampuan pegawai untuk membantu pelanggan atau masyarakat dan memberikan pelayanan dengan cepat.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dalam penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di desa Motilango kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo belum ada dikarenakan pelayanan dikantor desa motilango bersifat umum serta dijalankan sesuai regulasi mengenai Surat Tanah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait prosedur pengurusannya, hanya informasi yang disampaikan secara lisan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga

masyarakat harus bolak balik mempersiapkan berkas dalam pengurusan.

2. Waktu penyelesaian pengurusan SPPHT di desa Motilango sifatnya kondisional, sesuai dengan tahapan-tahapan yaitu pengukurannya, dan kelengkapan berkas. Jangka waktu pengurusan SPPHT kurang efektif bisa sampai berhari-hari terutama proses penandatanganan surat oleh pihak-pihak yang tercantum di dalam surat. kendalanya lainnya kepastian waktu penyelesaian juga tidak pasti. Pemerintah desa kurang membantu masyarakat jika terjadi permasalahan dalam kelengkapan administrasi oleh masyarakat.
3. Reponsivitas aparatur desa dalam penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di desa Motilango kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dalam memberikan pelayanan masih kurang baik. Sifat menunda-nunda pengurusan SPPHT oleh aparatur desa serta msyarakat akan direspon jika di datangi berulang-ulang dan di hubungi lewat telpon. Selain itu tindakan aparat desa masih kurang tanggap dalam melayani masyarakat yang mengalami kesulitan terutama masyarakat yang kurang begitu mengerti mengenai alur pembuatan surat sehingga harus bertanya dulu kepada kepala dusun. Aparat desa didalam menerapkan skala prioritas dalam mengerjakan tugasnya mendahulukan pekerjaan yang masih lama jangka waktu penyelesaiannya dibandingkan mendahulukan melayani masyarakat yang datang ke kantor kepala desa utama untuk meminta pelayanan administrasi.
4. Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dari aspek standar Operasional prosedur, waktu penyelesaian dan responsivitas aparat masih kurang optimal sehingga masyarakat yang datang didalam pengurusannya merasa dirugikan atas waktu dan keamanan.

Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni, Perlunya pemerintah desa Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo meningkatkan pelayanannya pada masyarakat khususnya dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari aspek standar Operasional prosedur, waktu penyelesaian dan responsivitas sehingga pemerintah desa dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya., (2015), *Metode Penelitian Administrasi*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruddin, S. Suriadi (2014). *Teori dan Indikator Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor
- Creswell, J. W. 2016. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi ke-3, Jakarta, 2003
- Dwiyanto, Agus., dkk.,(2018) *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendi.2013, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 1, No 2, Halaman 214225.
- Hayat. 2015. Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol.4 Nomor 1 Tahun 2015. Hal 828845.
- Hardinsyah, P., & Supariasa, I. D. N. (2016). *Ilmu Gizi: Teori Aplikasi*. Jakarta: EGC.
- Keban, Y.T. (2014) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. 3rd edn. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Miftah Thoha. 2013 "*Kepemimpinan dalam manajemen*" Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik.* Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, H. (2014) *Teori administrasi publik*. 6th edn. Bandung: Alfabeta, CV.
- Rismayanti, R.D., Musadieq, M. Al and Aini, E.K. (2018) 'Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasional Terhadap Turnover Intention Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Tetap Pg Kebon Agung Malang)', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 61(2), pp. 127–136
- Sara Nurfadillah Ramadhani, 141000207 (2018) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Ny. Yuyu Yuhana Terhadap Pemerintah Daerah Atas Tanah Sengketa Terkait Adanya Bangunan Sekolah Menengah*

- Pertama Negeri 3 Lembang Diatasnya Menurut UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Dr. Ulber Silalahi, M.. (2017) *Asas-asas manajemen*. 4th edn. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S.P. (2014) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Siagian, Sondang. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-24. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinamblea, L.P. (2016) *Manajemen Sumber daya manusia*. I. Edited by Suryani dan Restu Damayanti. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sarwono, Prawirohardjo, 2014. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi, 2016. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sumardjono, Maria S. W2009, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, cetakan keenam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Tahir, A. (2014) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, CV
- Tambunan M Rudi, 2013, *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Edisi 2013, Penerbit Maiesta.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2012). *Economic Development (11th ed)*. New York: Pearson.
- Ulyani, Grand. 2013. *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Van Gobel, S. *et al.* (2023) 'Penguatan Tata Kelola Administrasi Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo', *Community Development Journal*, 4(2), pp. 4697–4704. Available at:
- Widjaja, HAW. (2012) *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada
- Wiratha, I Made. 2016 . *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi offset.